

POLITIK ETIS DALAM PERADABAN ISLAM KLASIK: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN AL-FARABI

Karep

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Oku Selatan, Indonesia

Corresponden E-mail: 196806122003121004@kemenag.go.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan membandingkan pemikiran politik etis dua tokoh besar dalam peradaban Islam klasik, yaitu Al-Mawardi dan Al-Farabi. Keduanya hidup dalam konteks sosial-politik yang berbeda, namun sama-sama menawarkan fondasi filosofis dan normatif bagi praktik kekuasaan dalam tradisi Islam. Al-Mawardi, melalui karya monumentalnya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, menekankan pentingnya legalitas dan stabilitas institusi kekhalifahan berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, Al-Farabi, dalam *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah*, menampilkan pendekatan filosofis-utopis tentang negara utama yang dipimpin oleh al-ra'is al-awwal (pemimpin utama) sebagai pengejawantahan kebajikan tertinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif terhadap karya-karya primer kedua tokoh. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Mawardi lebih bersifat normatif-pragmatis dan fokus pada ketertiban politik riil, sedangkan Al-Farabi lebih idealistik dengan corak filsafat politik yang dipengaruhi oleh tradisi Yunani-Islam. Meskipun berbeda, keduanya memberikan kontribusi penting terhadap konseptualisasi etika politik dalam peradaban Islam, serta tetap relevan dalam diskursus kepemimpinan dan etika publik kontemporer. Temuan ini memperkaya khazanah keilmuan politik Islam dan mendorong reaktualisasi nilai-nilai etis dalam tata kelola politik di era modern.

Kata kunci: Politik Etis, Al-Mawardi, Al-Farabi, Peradaban Islam Klasik, Filsafat Politik Islam

ABSTRACT

This study aims to examine and compare the ethical political thought of two major figures in classical Islamic civilization, namely Al-Mawardi and Al-Farabi. Both lived in different socio-political contexts, yet both offered philosophical and normative foundations for the exercise of power within the Islamic tradition. Al-Mawardi, through his monumental work *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, emphasized the importance of the legality and stability of the caliphate institution based on the principles of sharia. Meanwhile, Al-Farabi, in *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah*, presents a philosophical-utopian approach to the ideal state led by al-ra'is al-awwal (the supreme leader) as the embodiment of the highest virtue. This study uses a qualitative approach with a literature review and comparative analysis of the primary works of the two figures. The results of the study show that Al-Mawardi is more normative-pragmatic and focuses on real political order, while Al-Farabi is more idealistic with a political philosophy influenced by the Greek-Islamic tradition. Despite their differences, both make important contributions to the conceptualization of political ethics in Islamic civilization and remain relevant in contemporary discourse on leadership and public ethics. These findings enrich the body of Islamic political science and encourage the revitalization of ethical values in political governance in the modern era.

Keywords: Ethical Politics; Al-Mawardi, Al-Farabi; Classical Islamic Civilization; Islamic Political Philosophy

A. PENDAHULUAN

Peradaban Islam klasik merupakan tonggak penting dalam sejarah pemikiran politik dunia (Muslihuddin Sa'adi et al., n.d.) Pada masa kejayaannya, Islam tidak hanya berkembang sebagai sistem keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan peradaban yang melahirkan struktur sosial-politik yang kompleks dan sistematis (Najih & Syafiri, 2024). Dalam konteks ini, pemikiran politik Islam tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai respon terhadap dinamika kekuasaan, otoritas keagamaan, serta tantangan sosial yang dihadapi umat Islam (Asy'ari Muthhar et al., 2016). Dua figur besar yang mewakili corak pemikiran yang berbeda namun sama-sama signifikan dalam diskursus ini adalah Al-Mawardi dan Al-Farabi. Keduanya

dianggap sebagai tokoh sentral dalam membangun paradigma politik etis dalam Islam, meskipun dengan pendekatan yang berbeda: satu berbasis pada fiqh dan praktik pemerintahan, sementara yang lain melalui filsafat dan rasionalitas (Hasibuan, 2021).

Pemikiran politik dalam Islam tidak semata-mata menyoal struktur kekuasaan atau bentuk pemerintahan, tetapi juga memuat dimensi etik yang kuat (Fadli, 2018). Dalam khazanah keislaman, kekuasaan dipandang bukan hanya sebagai alat untuk menata masyarakat, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai ilahiyah (Supian, 2020). Oleh karena itu, etika politik menjadi fondasi utama dalam konseptualisasi kepemimpinan dan pemerintahan Islam. Politik tidak dipisahkan dari moralitas, tetapi menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan, kebaikan bersama, dan kemaslahatan umat (Syam & Ag, 2017). Di sinilah relevansi pemikiran Al-Mawardi dan Al-Farabi menjadi krusial, karena keduanya mengembangkan teori politik yang tidak hanya bersifat praktis atau teknis, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai etis yang membentuk inti dari peradaban Islam (Hassan et al., 2017).

Al-Mawardi (972–1058 M), dikenal sebagai seorang ulama fikih, qadhi, dan penulis politik terkemuka dalam tradisi Sunni. Karyanya yang paling terkenal, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, merupakan salah satu referensi utama dalam bidang tata negara Islam klasik (Arif et al., 2022). Dalam karyanya, Al-Mawardi membahas struktur pemerintahan Islam, kewenangan khalifah, pengangkatan pejabat negara, serta prinsip-prinsip keadilan dalam kekuasaan. Al-Mawardi menekankan pentingnya otoritas politik yang sah berdasarkan syariat dan kebutuhan akan stabilitas institusional untuk menjamin kelangsungan umat (Zulkifli Butarbutar et al., 2022). Politik, dalam pandangan Al-Mawardi, adalah instrumen untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Oleh karena itu, pemimpin politik harus memenuhi standar etis tertentu agar dapat dipercaya menjalankan amanah publik (Abbas, 2016).

Sebaliknya, Al-Farabi (872–950 M), sebagai seorang filsuf Muslim besar yang dikenal sebagai "Guru Kedua" setelah Aristoteles, memformulasikan teori politik dalam kerangka filsafat etika dan metafisika. Dalam *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah* (Pemikiran Penduduk Negara Utama), Al-Farabi menggambarkan masyarakat ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf-raja, yakni pemimpin yang tidak hanya bijaksana secara intelektual tetapi juga suci secara spiritual (Aziz, 2015). Pemikiran politik Al-Farabi dipengaruhi kuat oleh filsafat Yunani, khususnya Plato dan Aristoteles, namun tetap dikembangkan dalam bingkai nilai-nilai Islam. Ia memandang bahwa kebahagiaan (*sa'adah*) merupakan tujuan akhir dari negara, dan untuk mencapainya dibutuhkan pemimpin yang mampu menuntun rakyat kepada kebaikan melalui ilmu dan hikmah (Kesuma, 2013). Etika, dalam pandangan Al-Farabi, adalah komponen esensial dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan bahagia (Malik, n.d.).

Studi komparatif antara Al-Mawardi dan Al-Farabi dalam konteks politik etis menjadi penting bukan hanya untuk memahami keragaman pemikiran politik Islam klasik, tetapi juga untuk menjawab tantangan kontemporer dalam praktik kekuasaan di dunia Muslim. Saat ini, banyak negara-negara Islam yang mengalami krisis legitimasi, praktik kekuasaan yang koruptif, serta minimnya prinsip etis dalam pengelolaan pemerintahan. Di tengah fragmentasi politik dan polarisasi ideologis, pemikiran politik Islam klasik dapat menjadi inspirasi untuk membangun kembali paradigma kepemimpinan yang adil, etis, dan berbasis nilai. Dengan mempelajari pemikiran Al-Mawardi dan Al-Farabi, kita tidak hanya memahami sejarah, tetapi juga memperoleh dasar normatif untuk transformasi politik masa kini.

Penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua tokoh tersebut mengartikulasikan prinsip-prinsip etika dalam sistem politik yang mereka gagas. Al-Mawardi

memberikan perhatian besar terhadap legitimasi formal kekuasaan, hukum Islam, dan mekanisme pemerintahan yang stabil. Ia menilai bahwa kekuasaan yang sah dan stabil adalah prasyarat untuk menegakkan keadilan dan mencegah kekacauan. Oleh sebab itu, etika politik dalam pandangan Al-Mawardi berkaitan erat dengan integritas personal pemimpin, loyalitas kepada syariat, serta keadilan dalam distribusi kekuasaan. Di sisi lain, Al-Farabi lebih menekankan pada dimensi filosofis dan teleologis dari kekuasaan. Ia memandang politik sebagai cabang dari filsafat praktis yang bertujuan membentuk manusia yang sempurna secara moral dan intelektual. Dalam hal ini, etika politik Al-Farabi bertumpu pada kebajikan, akhlak mulia, dan pencapaian kebahagiaan hakiki.

Perbedaan pendekatan antara Al-Mawardi dan Al-Farabi tidak semata-mata mencerminkan latar belakang keilmuan yang berbeda, tetapi juga konteks historis dan sosial yang melingkupi kehidupan mereka. Al-Mawardi hidup pada masa Dinasti Abbasiyah yang mengalami fragmentasi politik dan membutuhkan solusi praktis untuk menyelamatkan kekuasaan Islam dari keruntuhan. Sementara Al-Farabi hidup dalam konteks lebih pluralistik secara intelektual, yang mendorongnya mengembangkan model negara ideal berbasis rasionalitas filosofis. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan keduanya, melainkan untuk menunjukkan bagaimana dua pendekatan yang berbeda bisa saling melengkapi dalam membangun paradigma politik etis dalam Islam.

Urgensi dari kajian ini juga diperkuat oleh kebutuhan umat Islam saat ini untuk kembali menegaskan nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan. Di tengah realitas kontemporer yang penuh dengan krisis moral, konflik politik, dan ketimpangan sosial, pemikiran klasik Islam justru menawarkan fondasi nilai yang dapat diadaptasi dalam konteks modern. Gagasan Al-Mawardi tentang tanggung jawab moral pemimpin dan pentingnya stabilitas institusi, maupun visi Al-Farabi tentang kepemimpinan berbasis kebijaksanaan dan kebajikan, menjadi alternatif naratif terhadap wacana politik modern yang cenderung sekuler dan transaksional. Kajian ini bertujuan memperkaya khazanah keilmuan politik Islam dan memberikan kontribusi teoritik dalam membangun model politik yang etis, humanis, dan berkeadilan.

Dengan demikian, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Bagaimana konsep politik etis dikembangkan oleh Al-Mawardi dan Al-Farabi? Apa persamaan dan perbedaan antara keduanya dalam memahami hubungan antara kekuasaan dan moralitas? Dan bagaimana pemikiran mereka dapat digunakan sebagai dasar normatif dan filosofis dalam merumuskan tata kelola politik Islam yang lebih etis dan relevan bagi dunia kontemporer?. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui analisis kritis yang mendalam terhadap teks-teks utama dan literatur sekunder yang relevan, guna menghasilkan pemahaman yang utuh dan reflektif terhadap tema besar: politik etis dalam peradaban Islam klasik.

B. METODE

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis pemikiran tokoh dalam khazanah peradaban Islam klasik (Kuntowijoyo, 2018). Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan pemikiran politik etis dua tokoh besar Islam klasik, yaitu Al-Mawardi dan Al-Farabi, dalam konteks peradaban dan teori politik Islam. Pemilihan pendekatan kualitatif dipertimbangkan karena karakteristik data yang bersifat konseptual, normatif, dan interpretatif, yang tidak dapat dijelaskan secara numerik, melainkan melalui analisis mendalam terhadap teks dan makna (M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, 2019). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif-analitis, dengan pendekatan komparatif-filosofis. Pendekatan ini digunakan

untuk mengkaji pemikiran kedua tokoh secara mendalam, kemudian membandingkan struktur konseptual, argumentasi filosofis, serta basis epistemologis dari gagasan politik etis yang mereka tawarkan (Hasan, 2019). Analisis dilakukan terhadap gagasan-gagasan kunci dalam karya mereka, khususnya yang terkait dengan etika politik, struktur kekuasaan, dan kepemimpinan ideal.

Data penelitian ini bersumber dari:

Sumber primer,

Karya asli kedua tokoh yang menjadi objek studi:

- a. Al-Mawardi: *Al-Ahkam al-Sultaniyyah, Adab al-Dunya wa al-Din*
- b. Al-Farabi: *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah, Tahsil al-Sa'adah, dan Kitab al-Siyasah al-Madaniyyah*

Sumber sekunder, berupa buku-buku, artikel jurnal, disertasi, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik pemikiran politik Islam klasik, etika politik, dan peradaban Islam. Literatur sekunder digunakan untuk memberikan konteks historis, interpretasi kontemporer, dan pembacaan kritis atas teks-teks primer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*) dengan penelusuran pustaka yang komprehensif. Proses ini mencakup:

- a. Inventarisasi dan identifikasi karya-karya Al-Mawardi dan Al-Farabi yang relevan.
- b. Studi mendalam terhadap teks-teks primer dalam bahasa Arab dan terjemahan resmi.
- c. Penelusuran referensi sekunder melalui database akademik seperti JSTOR, Google Scholar, ProQuest, dan perpustakaan digital perguruan tinggi.
- d. Klasifikasi tematik atas gagasan-gagasan penting yang berkaitan dengan politik etis.

Analisis data dilakukan secara *deskriptif-kritis dan komparatif*. Langkah-langkah analisis meliputi:

- a. Deskripsi, Mengidentifikasi dan menjelaskan konsep-konsep utama dalam pemikiran Al-Mawardi dan Al-Farabi terkait etika politik.
- b. Interpretasi, Memahami makna filosofis dan teologis dari setiap gagasan dengan mempertimbangkan konteks historis dan latar belakang keilmuan masing-masing tokoh.
- c. Komparasi, Membandingkan titik temu dan titik beda antara model politik etis yang dikembangkan Al-Mawardi dan Al-Farabi.
- d. Refleksi kontemporer, Menganalisis relevansi pemikiran kedua tokoh terhadap problematika etika politik dalam dunia Islam kontemporer (Sugiyono, 2017).

Untuk menjaga validitas data dan interpretasi, digunakan teknik triangulasi sumber dan referensi silang antara teks primer dan kajian sekunder dari para ahli. Penelitian ini dilakukan di ruang lingkup keilmuan filsafat Islam dan politik Islam klasik. Secara geografis, penelitian bersifat non-lapangan dan dilakukan secara independen melalui akses literatur digital dan cetak dari perpustakaan akademik dan sumber daring ilmiah (Sugiyono, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran politik Islam klasik merupakan salah satu puncak pencapaian intelektual dalam sejarah peradaban Islam. Dua tokoh yang menonjol dan sering menjadi rujukan dalam diskursus tersebut adalah Al-Mawardi dan Al-Farabi. Meskipun berasal dari latar belakang keilmuan dan konteks sosial yang berbeda, keduanya memiliki perhatian yang besar terhadap hubungan antara kekuasaan, moralitas, dan tata kelola masyarakat (Malik, n.d.). Pemikiran mereka tidak hanya membahas struktur pemerintahan, tetapi juga menekankan pentingnya etika sebagai fondasi utama dalam membangun sistem politik yang sah dan berkeadilan. Bagian ini

menyajikan hasil analisis terhadap konsep-konsep kunci dalam pemikiran kedua tokoh tersebut, serta membandingkannya secara sistematis untuk mengungkap landasan politik etis dalam peradaban Islam klasik (Nasrul Fani, 2023).

Al-Mawardi merupakan salah satu pemikir hukum Islam terkemuka dalam tradisi Sunni, yang hidup pada masa kemunduran Dinasti Abbasiyah. Dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi mengembangkan konsep politik Islam yang didasarkan pada prinsip syariah dan kebutuhan praktis pemerintahan. Ia menekankan bahwa kekuasaan politik dalam Islam adalah amanah (*trust*) yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin (khalifah) yang adil, berilmu, dan bertakwa (Umar, 2019).

Konsep politik etis Al-Mawardi berpijak pada tiga fondasi utama:

- a. Legitimasi berdasarkan syariat: Seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat syari'i, seperti muslim, adil, berilmu, dan mampu menjalankan hukum Islam.
- b. Etika kepemimpinan: Pemimpin harus menjaga keadilan ('adl), integritas, serta amanah terhadap rakyat dan Tuhan.
- c. Kemaslahatan umat: Tujuan utama kekuasaan adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan prinsip maslahat (*public good*).

Etika dalam konteks Al-Mawardi bukan semata nilai moral individu, melainkan menjadi landasan bagi pembentukan sistem pemerintahan yang sah dan fungsional. Al-Mawardi berpandangan bahwa penyimpangan etis dalam kepemimpinan akan mengarah pada kekacauan sosial dan kehancuran negara. Oleh karena itu, stabilitas politik menjadi nilai etis itu sendiri dalam kerangka maqashid al-syari'ah.

Sementara itu, Al-Farabi mengembangkan teori politiknya dari sudut pandang filosofis yang sangat dipengaruhi oleh Plato dan Aristoteles. Dalam karya utamanya *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah*, ia menyusun konsep negara utama (*al-madinah al-fadilah*) sebagai perwujudan tertinggi dari kehidupan kolektif manusia yang dituntun oleh akal dan kebajikan. Negara ideal ini dipimpin oleh seorang *al-ra'is al-awwal*, yakni pemimpin yang tidak hanya memahami hukum dan agama, tetapi juga menguasai filsafat dan memiliki kualitas moral tertinggi.

Pemikiran etika politik Al-Farabi dibangun di atas beberapa prinsip utama:

- a. Tujuan politik adalah kebahagiaan (*sa'adah*): Politik adalah sarana untuk mencapai kesempurnaan moral dan spiritual manusia, bukan semata pengelolaan kekuasaan.
- b. Kebajikan sebagai syarat kepemimpinan: Pemimpin ideal harus memiliki hikmah (kebijaksanaan), keberanian, keadilan, dan pengendalian diri.
- c. Struktur sosial berbasis hierarki moral: Negara yang baik adalah negara yang masyarakatnya diarahkan pada kebaikan bersama dan nilai-nilai universal.

Al-Farabi meyakini bahwa hanya melalui penggabungan antara filsafat, agama, dan moralitas, negara dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, pemimpin tidak cukup hanya memiliki kekuasaan formal, tetapi harus menjadi model moral bagi rakyatnya.

Tabel 1. Perbandingan Aspek-Aspek Utama Dalam Pemikiran Politik Etis

Aspek	Al-Mawardi	Al-Farabi
Basis Pemikiran	Berbasis pada syariat Islam dan fiqh	Berbasis pada filsafat Yunani yang diselaraskan dengan Islam
Tujuan Kekuasaan	Menjaga agama dan maslahat umat	Mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan manusia
Tipe Pemimpin Ideal	Khalifah yang adil, berilmu, dan menjunjung syariat	Filsuf-raja yang memiliki hikmah, akal, dan moral
Fungsi Etika	Menjamin stabilitas politik dan keadilan sosial	Menuntun manusia menuju kesempurnaan moral
Konsep Masyarakat Ideal	Masyarakat yang tertib secara hukum dan agama	Madinah Fadilah: masyarakat utopis yang dipimpin oleh akal
Fokus Utama	Praktis-normatif: mengatur realitas kekuasaan secara hukum	Filosofis-utopis: membayangkan negara ideal secara teoritis

Dari tabel tersebut, tampak bahwa Al-Mawardi lebih menekankan dimensi praktis dan hukum dari kekuasaan, sedangkan Al-Farabi fokus pada dimensi filosofis dan teleologis. Namun demikian, keduanya sepakat bahwa etika merupakan inti dari politik yang sah dan bermanfaat. Politik tanpa etika, dalam pandangan kedua tokoh ini, akan menjerumuskan masyarakat pada tirani dan ketidakadilan.

Konteks Historis dan Peradaban

Perbedaan orientasi pemikiran antara Al-Mawardi dan Al-Farabi sangat dipengaruhi oleh konteks zaman mereka. Al-Mawardi hidup dalam suasana krisis politik, di mana kekuasaan khilafah sedang melemah dan otoritas lokal seperti Dinasti Buwaihiyah mengambil alih peran penting dalam pemerintahan. Dalam situasi ini, Al-Mawardi menawarkan solusi praktis melalui penguatan institusi negara berbasis hukum Islam. Sebaliknya, Al-Farabi hidup dalam suasana relatif damai secara politik, tetapi penuh dengan dinamika intelektual. Ia aktif di pusat peradaban Islam seperti Baghdad dan Damaskus yang menjadi tempat pertemuan antara filsafat Yunani, ilmu pengetahuan, dan teologi Islam. Dengan latar ini, Al-Farabi lebih leluasa mengembangkan sistem pemikiran yang utuh, utopis, dan berlandaskan akal sebagai instrumen kebenaran. Meskipun berbeda konteks, pemikiran keduanya tetap berkontribusi pada pembentukan peradaban Islam yang menekankan keseimbangan antara agama, akal, dan moralitas dalam pengelolaan kekuasaan.

Relevansi dengan Konteks Politik Kontemporer

Pemikiran politik etis dari Al-Mawardi dan Al-Farabi masih sangat relevan dalam menjawab tantangan kekuasaan di dunia Islam kontemporer. Di berbagai negara Muslim, krisis legitimasi, korupsi politik, lemahnya etika kepemimpinan, serta absennya visi moral dalam pemerintahan menjadi masalah yang terus berulang. Dalam situasi demikian, pembacaan ulang terhadap pemikiran klasik menjadi langkah penting untuk menawarkan solusi normatif dan filosofis.

Gagasan Al-Mawardi mengenai perlunya integritas moral dalam kekuasaan dapat menjadi dasar untuk memperkuat institusi politik yang bersih, berorientasi pada keadilan sosial, dan loyal terhadap prinsip-prinsip agama. Sementara itu, visi Al-Farabi tentang pemimpin yang filosofis dan berbudi luhur dapat mendorong rekonstruksi kepemimpinan politik Islam berbasis nilai, bukan sekadar kekuatan ekonomi atau militer. Lebih dari itu, kedua tokoh ini mengajarkan

bahwa politik tidak boleh lepas dari nilai-nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan. Politik yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan kemenangan praktis akan berujung pada kehancuran tatanan sosial. Oleh karena itu, integrasi antara kekuasaan, ilmu, dan akhlak menjadi inti dari politik etis Islam.

Implikasi Teoretik dan Konseptual

Kajian ini juga memperlihatkan bahwa politik etis dalam Islam bukanlah wacana marginal, tetapi merupakan inti dari tradisi keilmuan Islam klasik. Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Farabi menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam adalah bentuk tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan kesadaran transendental. Etika bukanlah nilai tambahan, melainkan esensi dari kekuasaan itu sendiri. Implikasi konseptual dari kajian ini mengarah pada perlunya merumuskan kembali model kepemimpinan Islam yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga etis secara substansial. Etika publik, kepemimpinan profetik, dan kebijakan berbasis nilai merupakan warisan pemikiran klasik yang dapat dijadikan fondasi untuk merumuskan politik Islam kontemporer yang beradab.

D. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Mawardi dan Al-Farabi sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konstruksi politik etis dalam peradaban Islam klasik, meskipun keduanya menempuh pendekatan dan latar belakang intelektual yang berbeda. Al-Mawardi membangun sistem politik Islam berdasarkan landasan normatif-syar'i, dengan fokus pada stabilitas institusional dan keabsahan kekuasaan dalam kerangka hukum Islam. Etika dalam pandangannya erat kaitannya dengan amanah kepemimpinan, keadilan sosial, dan ketaatan terhadap syariat sebagai sumber legitimasi politik. Sebaliknya, Al-Farabi menawarkan paradigma politik yang lebih filosofis, utopis, dan teleologis. Ia menekankan pentingnya kebajikan, rasionalitas, dan kebahagiaan (sa'adah) sebagai tujuan akhir dari kekuasaan, dengan sosok pemimpin ideal sebagai kombinasi antara filsuf, nabi, dan negarawan. Perbandingan antara kedua tokoh ini mengungkap bahwa meskipun terdapat perbedaan metodologis dan epistemologis, keduanya berpijak pada prinsip bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual. Etika bukan hanya sebagai pelengkap politik, melainkan sebagai fondasi yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pemerintahan dalam perspektif Islam. Dengan demikian, politik etis menjadi konsep kunci yang membedakan tradisi politik Islam klasik dari model kekuasaan sekuler modern. Relevansi pemikiran Al-Mawardi dan Al-Farabi sangat nyata dalam konteks kontemporer, di mana banyak negara Muslim menghadapi krisis legitimasi, lemahnya kepemimpinan moral, dan penyimpangan kekuasaan dari prinsip-prinsip keadilan. Pemikiran klasik mereka dapat dijadikan rujukan normatif dan filosofis untuk membangun kembali etika publik, integritas kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Kajian ini juga menegaskan bahwa warisan peradaban Islam bukan hanya historis, tetapi juga aktual dan dapat diberdayakan untuk membentuk wacana politik Islam yang adil, humanis, dan berperadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. (2016). Pemikiran Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 17(1), 68–83. <https://doi.org/10.24252/JDT.V17I1.6077>
- Arif, M., Junaidi, S., Basri, H., & Negara Dan Kepemimpinan Matroni, K. (2022). Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah dan Gus Dur: Konsep Negara dan Kepemimpinan. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6(2), 388–413. <https://ejournal.stidar.ac.id/index.php/aliman/article/view/6045>

- Aziz, J. A. (2015). Pemikiran Politik Islam Muhammad 'Abid Al-Jabiri: Telaah terhadap Buku al-'Aql al-Siyāsi al-'Arabī: Muhaddidātuh wa Tajalliyātuh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(1). <https://doi.org/10.30821/MIQOT.V39I1.42>
- Fadli, Y. (2018). Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal Atas Perspektif Kalangan Sunni). *Journal of Government and Civil Society*, 2(1), 89–106. <https://doi.org/10.31000/JGCS.V2I1.777>
- Hasan. (2019). *Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Kemendiknas.
- Hasibuan, M. H. (2021). *Analisis Pemikiran Etika Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun (Studi Tokoh)*.
- Hassan, A., Fakultas, P., Dan, T., Uin, K., & Riau, S. (2017). Pemikiran Politik Islam: Tinjauan Sejarah Awal Islam Klasik. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5(1), 83–100. <https://doi.org/10.24014/AF.V5I1.3769>
- Kesuma, A. S. (2013). Islam Dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), 457–480. <https://doi.org/10.24042/AJSK.V13I2.703>
- Kuntowijoyo. (2018). *Metodologi sejarah*. Tiara Wacana.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur. (2019). *Metodologi Penelitian Kulaitatif, 1st ed.* Ar-Ruzz Media.
- Malik, D. D. I. I. S. (n.d.). Zaman baru Islam Indonesia : pemikiran & aksi politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rakhmat. (*No Title*). Retrieved August 8, 2025, from <https://cir.nii.ac.jp/crid/1971712334815516729>
- Nasrul Fani. (2023). *Pemikiran Politik Islam (Studi Pemikiran Abdurrahman Wahid Dan Nurcholish Madjid)*.
- Muslihuddin Sa'adi, G., Hasan, A., Umar, M., & Khasy'ini, N. (n.d.). Pemikiran Politik Al-Farabi. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2. <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>
- Najih, N. S., & Syafiri, M. A. (2024). Pemikiran Ibnu Maskawaih dan Imam Al-Mawardi Tentang Ekonomi Islam. *ASNAF : Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf*, 3(2), 155–172. <https://doi.org/10.32505/ASNAF.V3I2.8694>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Manajemen, 5th ed.* Alfabeta.
- Supian, S. (2020). Diskursus Pemikiran Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan : Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 227–250. <https://doi.org/10.20414/Politea.V3I2.2311>
- Syam, S., & Ag, M. (2017). Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 2(2), 485–498. <https://doi.org/10.54248/ALHADI.V2I2.156>
- Umar, U. (2019). Pemikiran Politik Era Kenabian, Sahabat Dan Sekte-Sekte Islam: Tinjauan Sketsa Historisitas. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 5(2), 16–42. <https://doi.org/10.47435/MIMBAR.VIII.284>
- Asy'ari Muthhar, M., Abdillah, M., & Kamil, S. (2016). *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi: Relevansi Dengan Pemikiran Politik Modern*. <https://doi.org/10.3.00.1.02.01.0007>
- Zulkifli Butarbutar, M., Damanik, K., & Manurung, M. (2022). Menilik Perkembangan Pemikiran Politik Islam Masa Modern (Sebuah Pembacaan Awal). *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(4), 6–10. <https://doi.org/10.57251/HIJ.VII4.451>